

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Stakeholder Theory*

Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa dalam teori *stakeholder* atau *stakeholder theory*, perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* nya yang meliputi, pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat dan pihak lain.

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif diantara keberadaan lingkungan perusahaan mereka namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori *stakeholder* adalah untuk mendorong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi *stakeholder* (Ulum, 2017:36).

Para *stakeholder* membutuhkan berbagai informasi terkait dengan aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, tumbuh kembang perusahaan bergantung pada dukungan dari *stakeholder*, maka perusahaan akan berusaha untuk memberikan berbagai informasi bagi *stakeholder*. Publikasi *suainability report* yang bersifat sukarela merupakan kebijakan suatu

perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih transparan mengenai aktivitas perusahaan terhadap dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga, dengan tambahan informasi dapat menjadi pertimbangan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

Perusahaan dengan struktur *corporate governance* yang baik, memiliki kemungkinan besar untuk mengungkapkan laporan-laporan yang bersifat sukarela. Adanya *corporate governance* yang meliputi komite audit, dewan komisaris dan *governance committee* diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan untuk mengungkapkan suatu laporan. Pengaruh *corporate governance* dinilai mampu meningkatkan publikasi *sustainability report* yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan (Aniktia dan Khafid, 2015).

2. *Signalling Theory*

Teori sinyal atau *Signalling Theory* mengemukakan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan dan non keuangan. *Signalling theory* merupakan suatu tindakan yang diambil oleh manajemen dengan cara memberikan petunjuk kepada investor bagaimana cara menilai prospek perusahaan secara kedepannya (Bringham dan Houston, 2012:184).

Signalling theory merupakan teori yang menyatakan bahwa manajer memberikan sinyal berupa perilaku yang dilakukan oleh manajer yang memiliki kinerja yang baik dan tidak mungkin dilakukan oleh manajer dengan kinerja yang buruk, dengan adanya perbedaan

yang signifikan antara kedua manajer tersebut akan semakin memudahkan investor untuk memilih dan menentukan keputusan pada perusahaan mana para investor yang akan menanamkan sahamnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan lebih membantu manajer untuk memberikan sinyal baik kepada para pihak manajemen dan investor bagi perusahaan mempunyai prospek yang bagus dimasa yang datang (Khafid dan Mulyaningsih, 2012).

Menurut Swardjono (2013: 583) menyatakan bahwa *Signalling theory* atau yang dikenal dengan teori persinyalan memiliki fungsi dalam menekankan informasi penting yang berguna bagi para investor dalam menetapkan keputusan investasi untuk pihak di luar perusahaan. Informasi tersebut berupa keterangan, catatan ataupun gambaran keadaan dimasa lalu, keadaan saat ini maupun keadaan masa depan yang berguna dalam memprediksi keadaan kelangsungan hidup masa depan perusahaan (*going concern*).

Berdasarkan teori sinyal faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan suatu perusahaan adalah struktur modal dan pertumbuhan perusahaan. Struktur modal memiliki implikasi penting terhadap perilaku investasi. Investor akan merasa aman melakukan investasi dengan struktur modal dengan *leverage* yang rendah. Perusahaan dengan *debt to equity ratio* yang rendah dapat memberikan sinyal yang baik untuk para investor dikarenakan dengan *debt to equity ratio* yang rendah akan lebih meyakinkan para investor

untuk menanamkan sahamnya karena dipercaya bahwa perusahaan akan lebih mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai *debt to equity ratio* yang tinggi. perusahaan dengan komposisi hutang yang lebih besar telah menanggung biaya modal yang tinggi, sehingga harus melakukan penghematan dan mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial (Khafid dan Mulyaningsih, 2015).

Perusahaan dengan *growth* yang tinggi lebih cenderung akan melakukan pengungkapan yang lebih luas karena dengan *growth* yang tinggi maka perusahaan akan memiliki cukup dana untuk melakukan lebih dari sekedar pengungkapan laporan keuangan salah satunya adalah pelaporan sukarela dalam bentuk *sustainability report*. Hal ini sesuai dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa ketika perusahaan mengalami perkembangan yang baik maka respon positif akan didapat dari investor (Khafid dan Mulyaningsih, 2015).

3. Publikasi *Sustainability Report*

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) memiliki definisi yang beragam. Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengungkapkan (*disclosure*) atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi, lingkungan hidup dan sosial masyarakat secara akuntabel (Hadad dan Muftuchah:276).

Menurut Al Adawiyah dan Sugiyanto (2016) *sustainability report* merupakan laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mengungkapkan kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam rangka menuju pembangunan yang berkelanjutan. Laporan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan komitmen serta kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat luas secara transparan.

Global Reporting Initiative (GRI) mendefinisikan *sustainability report* sebagai praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan sebagai tanggung jawab kepada seluruh *stakeholder* mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian laporan keberlanjutan (*sustainability report*) adalah suatu laporan yang bersifat sukarela yang menjelaskan mengenai 3 aspek diantaranya aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sustainability disusun berdasarkan pedoman dari *Global reporting Initiative* (GRI) yang telah dikembangkan sejak tahun 1990 dan berpusat di Amsterdam, Belanda. Pengungkapan *sustainability report* yang berdasarkan GRI G4 *Guidelines* terbagi menjadi beberapa komponen yaitu ekonomi, lingkungan, praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan pekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab atas produk.

Effendi (2009:211) proses penyajian *sustainability reporting* dapat dilakukan melalui 5 (lima) mekanisme, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan yang berkelanjutan (*sustainability development*), kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya.
- b. Tekanan pada rantai pemasok (*supply chain*). Harapan masyarakat pada perusahaan untuk memberikan produk dan jasa yang ramah lingkungan juga memberikan tekanan pada perusahaan untuk menetapkan standar kinerja dan *sustainability reporting* kepada para pemasok dan mata rantainya.
- c. Keterlibatan pemangku kepentingan.
- d. *Voluntary codes*. Dalam mekanisme ini, masyarakat meminta perusahaan untuk mengembangkan aspek-aspek kinerja *sustainability* dan meminta perusahaan untuk membuat laporan pelaksanaan *sustainability*. Apabila perusahaan belum melaksanakan, maka perusahaan harus memberikan penjelasan.
- e. Mekanisme lain adalah *rating* dan *benchmarking*, pajak dan subsidi, izin-izin yang dapat diperdagangkan, serta kewajiban dan larangan.

4. Struktur Modal

Struktur modal didefinisikan sebagai komposisi dan proporsi utang jangka panjang dan ekuitas (saham *preferen* dan saham biasa) yang ditetapkan perusahaan. Utang jangka pendek tidak diperhitungkan dalam struktur modal karena utang jenis ini umumnya bersifat spontan (berubah sesuai dengan perubahan tingkat penjualan). Sementara utang

jangka panjang bersifat tetap selama jangka waktu yang relatif panjang (lebih dari satu tahun) sehingga keberadaannya perlu lebih dipikirkan oleh para manajer keuangan (Mardiyanto, 2011:258).

Fahmi (2011) struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (*long term liabilities*) dan modal sendiri (*shareholders equity*) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Adapun rasio yang digunakan dalam pengukuran struktur modal *Number of Times Interest is Earned* yaitu membandingkan pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Struktur modal diukur dalam satuan presentase (%). Pendapatan sebelum bunga pajak adalah ukuran dari profitabilitas perusahaan yang tidak termasuk bunga dan beban pajak penghasilan. Sedangkan beban bunga adalah beban yang timbul karena pinjaman uang pada bank yang dikenai bunga. Struktur modal suatu perusahaan dapat diasumsikan dengan rumus:

$$NTIE = \frac{\text{Pendapatan Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Beban Bunga}} \times 100\%$$

Namun menurut penelitian (Riza, 2017) struktur modal merupakan sumber jangka panjang yang bersifat pinjaman dan modal sendiri. Adapun rasio yang digunakan dalam penelitian Riza (2017) struktur modal diprosikan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan alat untuk menilai total hutang dibagi dengan total ekuitas. Struktur modal diukur dengan satuan presentase (%). Total utang adalah

kewajiban membayar kepada pihak lain akibat transaksi sebelumnya yaitu kewajiban lancar. Sedangkan total ekuitas adalah seluruh hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan aktiva bersih (jumlah aktiva dikurangi kewajiban). Struktur modal suatu perusahaan dapat diasumsikan dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Menurut Permatasari dan Azizah (2018) struktur modal merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Perhitungan struktur modal dapat menggambarkan kemampuan modal perusahaan dalam menjamin hutang jangka panjangnya. Semakin tinggi nilai struktur modal perusahaan, maka risiko yang diperoleh perusahaan menjamin hutang jangka panjangnya juga semakin tinggi karena memunculkan modal. Struktur modal dalam penelitian Permatasari dan Azizah (2018) diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR). *Debt to asset ratio* merupakan rasio perbandingan antara total hutang terhadap total aktiva yang dimiliki perusahaan guna menunjukkan seberapa besar presentase total aset yang dibiayai dari utang. Struktur modal yang diproksikan dengan *debt to asset ratio* menggunakan satuan presentase (%). Rumus untuk menghitung *debt to asset ratio* adalah:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

5. Pertumbuhan Perusahaan

pertumbuhan perusahaan (*growth*) merupakan salah satu pertimbangan para investor dalam menanamkan investasinya dimana

pertumbuhan dapat menunjukkan peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang memiliki kesempatan untuk memberikan profitabilitas yang tinggi dimasa depan (Munsaidah, 2016). Dalam penelitian Munsaidah, dkk (2016) pertumbuhan (*growth*) diukur dengan pertumbuhan penjualan perusahaan dengan satuan presentase (%). Rumus yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan perusahaan adalah:

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan}_t - \text{Penjualan}_{t-1}}{\text{Penjualan}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Penjualan_t: Penjualan bersih (*net sales*) periode tahun berjalan

Penjualan_{t-1}: Penjualan bersih (*net sales*) periode tahun sebelumnya

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Insiroh (2014), untuk mengukur pertumbuhan suatu perusahaan diproksikan dengan pertumbuhan aset. Pertumbuhan dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset dimana pertumbuhan aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang. Rumus yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan perusahaan yang diproksikan melalui pertumbuhan aset dengan satuan presentase (%) adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Total Aset}_t - \text{Total Aset}_{t-1}}{\text{Total Aset}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Total Aset_t: Total aset tahun berjalan

Total Aset_{t-1}: Total aset tahun sebelumnya

Kuzey dan Uyar (2016) Peningkatan peluang pertumbuhan dalam hal keuangan harus sejalan dengan peningkatan kinerja non keuangan. Hal tersebut akan berguna untuk mempertahankan bisnisnya. Peluang pertumbuhan (pertumbuhan perusahaan) diukur menggunakan rasio *Market to Book*. Rumus untuk menghitung rasio *Market to Book* adalah sebagai berikut:

$$\text{Market to Book} = \frac{\text{Saham Beredar} \times \text{Harga Saham}}{\text{Total ekuitas}}$$

6. *Corporate Governance*

Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), *corporate governance* merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Terdapat beberapa prinsip dalam implementasi *good corporate governance (GCG)*. Menurut pedoman umum *good corporate governance* Indonesia, terdapat lima prinsip utama yang terkandung dalam *good corporate governance* yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* serta *fairness* yang akan dijabarkan sebagai berikut :

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, termasuk tentang kegiatan *CSR*.
- b. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan dengan prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
- d. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan. Adanya praktik *good corporate governance* yang baik di dalam suatu perusahaan diharapkan dapat mengurangi risiko yang merugikan bagi perusahaan itu sendiri.

Good corporate governance merupakan kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Berikut adalah mekanisme dalam *good corporate governance*:

a. Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 20 tahun 2007 pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan

komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak berafiliasi, sedangkan komisaris non independen merupakan komisaris terafiliasi. Maksud dari terafiliasi adalah pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain (Aziz, 2014). Dewan komisaris dapat diukur dengan cara dibawah ini:

$$\text{Dewan Komisaris} = \sum \text{Jumlah anggota dewan komisaris}$$

b. Komite Audit

Menurut Samsul (2006:72) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat.

Pada awalnya, keberadaan komite audit memegang fokus pada upaya mewujudkan keandalan pelaporan keuangan. Keandalan pelaporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh independensi dan integritas proses audit. Komite audit bertanggung

jawab untuk merekomendasikan pemilihan auditor eksternal kepada dewan, menjamin kesehatan dan kualitas praktik pengendalian internal dan praktik akuntansi, serta memantau independensi auditor eksternal dari tekanan manajemen perusahaan. Keberadaan komite audit juga merupakan upaya memonitoring dan meminimumkan informasi asimetri di antara pihak manajemen dan para pemangku kepentingan lainnya. Perkembangan tuntutan para pemangku kepentingan menjadikan peran komite audit dibutuhkan untuk menjamin keandalan semua informasi atas perusahaan yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, komite audit dibentuk dewan komisaris untuk melakukan komunikasi formal antara dewan komisaris, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal (Khafid dan Mulyaningsih, 2012)

Berdasarkan keputusan Bapepam Bomor Kep-24/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan. Rapat dilaksanakan untuk melakukan koordinasi agar efektif dalam menjalankan pengawasan laporan dan pelaksanaan *corporate governance* perusahaan agar menjadi semakin baik (Suryono dan Prastiwi, 2011). Komite audit dapat diukur dengan cara dibawah ini yang dinyatakan dalam satuan rasio:

Komite Audit= \sum Jumlah Rapat komite audit dalam satu periode

c. Proporsi Komisaris Independen

Mekanisme *corporate governance* yang tidak kalah penting adalah proporsi dewan komisaris independen. Menurut Effendi (2009), komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Peran dewan komisaris independen sangat penting dan cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi *good corporate governance*.

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Komisaris independen berjumlah proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki non pemegang saham pengendali. Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris Samsul (2006:72). Proporsi dewan komisaris independen dapat diukur dengan cara dibawah ini, yang dinyatakan dalam satuan presentase:

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$$

d. Governance Committe

Safitri dan Saifudin (2019) menyatakan bahwa *Governance committee* adalah komite yang terdiri dari beberapa anggota dewan direksi. Penciptaan *good corporate governance* suatu perusahaan

dapat diwujudkan salah satunya melalui pembentukan dan penunjukkan anggota *governance committee* yang berkompeten dan berkualitas. Tujuan dari *governance committee* adalah melakukan pengawasan terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan atas laporan keuangan.

Dalam melihat praktik *corporate governance* suatu perusahaan, untuk menuju praktik yang baik, kuat dan berkesinambungan, yang harus diperhatikan bukan hanya perusahaan tersebut telah menjaankan praktik biasa seperti halnya menunjukan komisaris independen, pelaksanaan rapat dewan direksi, proporsi dewan direksi, melainkan juga harus dilihat melalui pembentukan komite-komite tambahan yang dibentuk perusahaan sebagai suatu bentuk usaha perwujudan *good corporate governance* yang kuat. Komite-komite dibentuk sebagai pembantu dalam kinerja dewan agar dapat lebih fokus dan berkompeten dalam menangani masalah dan pemberian solusi sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. komite-komite yang dibentuk yang dimaksud antara lain: komite GCG (*governance committee*), komite manajemen resiko, komite anggaran, komite investasi, komite remunerasi dan nominasi ataupun yang lain sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing penerapan prinsip *good corporate governance* adalah untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang

efektif dan efisien melalui harmonisasi manajemen perusahaan (Suryono dan Prastiwi, 2011).

Pengukuran *governance committee* menggunakan variabel *dummy* yang dinyatakan dalam satuan nominal, dimana nilai 1 untuk perusahaan yang memiliki *governance comitte* dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki *governance committee* atau komite GCG (Safitri dan Saifudin, 2019).

e. Kepemilikan Saham Institusional

Menurut Shien, et. al (2006) dalam Subagyo, dkk (2018:42) Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya pada akhir tahun. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan saham institusional dapat diukur dengan cara dibawah ini yang dinyatakan dalam satuan presentase:

$$KI = \sum \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Keterangan:

KI = Kepemilikan institusional

f. Kepemilikan Saham Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen (direksi dan komisaris) yang diukur dari presentase jumlah saham manajemen (Subagyo dkk, 2018). Dalam hal ini kepemilikan saham manajerial dinilai dapat mengatasi konflik keagenan, karena dapat mensejajarkan kepentingan pemegang saham dengan manajer. Hal ini dapat terjadi karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil, dan akan ikut menanggung resiko atas kesalahan pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Pengukuran proporsi kepemilikan saham manajerial dapat dihitung dengan rumus dibawah ini dengan satuan pengukuran presentase:

$$KM = \sum \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Keterangan:

KM = Kepemilikan Manajerial

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil
1.	Riza (2017)	Variabel Independen: Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan. Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> .	Variabel Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> .
2.	Khafid dan Mulyaningsih (2015)	Variabel Independen: Komite Audit, <i>Governance Committe</i> . Variabel Dependen: Publikasi <i>Sustainability Reporting</i> .	Variabel Komite Audit tidak berpengaruh terhadap publikasi <i>Sustainability Reporting</i> . Variabel <i>Governance Committe</i> berpengaruh positif terhadap Publikasi <i>Sustainability Reporting</i> .
3.	Dewi dan Pitriasari (2019)	Variabel Independen: Komite Audit. Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> .	Variabel Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> .
4.	Nasir, ilham dan Utara (2014)	Variabel Independen: Komite Audit, <i>Governance Committe</i> . Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> .	Variabel Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> . Variabel <i>Governance Committe</i> berpengaruh positif terhadap Publikasi <i>Sustainability Reporting</i> .

Lanjutan Tabel 2.1

6.	Kuzey dan Uyar (2016)	Variabel Independen: Pertumbuhan Perusahaan Variabel Dependen: Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.	Variabel Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan.
7.	Safitri dan Saifudin (2019)	Variabel Independen: Komite Audit, Dewan Komisaris, <i>Governance Committe</i> . Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .	Variabel Komite Audit, <i>Governance Committe</i> berpengaruh positif terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> . Variabel Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .
8.	Afsari, Purnawati dan Prayudi (2017)	Variabel Independen: Komite Audit. Variabel Dependen: Luas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .	Variabel Komite Audit berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .
9.	Odoemelum dan Okafor (2018)	Variabel Independen: Komite Audit. Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .	Variabel Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .
10.	Aniktia dan Khafid (2015)	Variabel Independen: Struktur Modal (DER), Komite Audit, <i>Governance Committe</i> . Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .	Variabel Struktur Modal (DER), Komite Audit, <i>Governance Committe</i> berpengaruh positif terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .

Lanjutan Tabel 2.1

11.	Siregar dan Rudyanto (2016)	Variabel Independen: Ukuran Dewan Komisaris Variabel Dependen: Laporan Keberlanjutan.	Variabel Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Laporan Keberlanjutan.
12.	Afsari (2017)	Variabel Independen : Struktur Modal (DER) Variabel Dependen : Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .	Variabel Struktur Modal berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .
13.	Hongyu and Xianbo (2018)	Variabel Independen: Struktur Modal Variabel Dependen : Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .	Variabel Struktur Modal berpengaruh positif terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .
14.	Natalia dan Wahidahwati (2016)	Variabel Independen: Struktur Modal Variabel Dependen : Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .	Variabel Struktur Modal berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen struktur modal, pertumbuhan perusahaan dan *corporate governance* (komite audit, dewan komisaris, dan *governance committee*) terhadap variabel dependen pengungkapan *sustainability report*. Laporan non finansial dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh perusahaan dalam melihat dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta sebagai alat komunikasi perusahaan dengan *stakeholdernya* (Benardi, dkk, 2009). Laporan non finansial yang dimaksud adalah *sustainability report*. *Sustainability report* merupakan salah satu jenis pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh

peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Isi yang terdapat dalam *sustainability report* sebagian besar cenderung indentik dengan isi program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Struktur modal (*capital structure*), dalam mendanai aktivitas operasinya perusahaan membutuhkan modal baik yang diperoleh melalui hutang jangka panjang maupun modal milik pribadi. Tingkat *leverage* yang tinggi pada suatu perusahaan dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Perusahaan dalam menggapai laba yang tinggi maka akan mengurangi biaya biaya sosial seperti publikasi *sustainability report* (Riza, 2017).

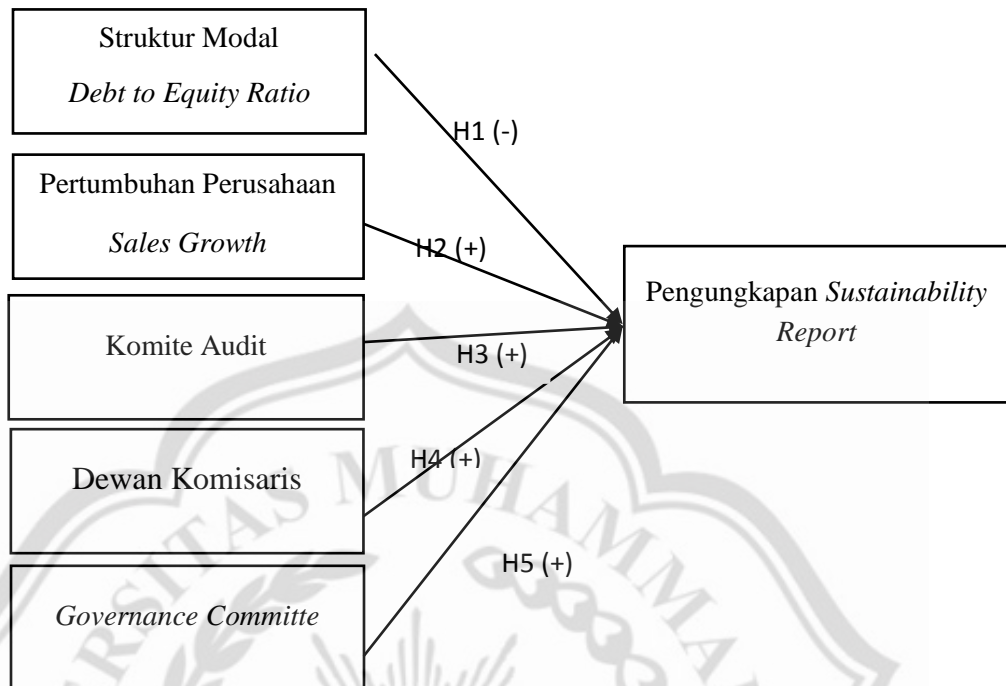
Sales growth menunjukkan pertumbuhan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Besarnya *sales growth* suatu perusahaan akan berpengaruh pada pengungkapan sukarela seperti *sustainability report*. Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi akan mendapat banyak perhatian dari masyarakat, sehingga cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan *sustainability report* (Riza, 2017).

Keberadaan komite audit akan mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan yang lengkap dan berintegritas tinggi. Perkembangan tuntutan para pemangku kepentingan menjadikan peran komite audit diyakini dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan manajemen berkepentingan untuk mempublikasikan *sustainability report* (Khafid dan Mulyaningsih, 2015).

Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Melalui monitoring oleh dewan komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat terjamin kelangsungannya. Dengan proses monitoring yang baik, maka diharapkan kualitas informasi *sustainability report* semakin luas (Safitri dan Saifudin, 2019).

Penciptaan *good corporate governance* suatu perusahaan dapat diwujudkan salah satunya melalui pembentukan dan penunjukan anggota *governance committee* yang kompeten dan berkualitas. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholders*. Pengungkapan informasi secara detail akan memberi gambaran kinerja perusahaan sesungguhnya, sehingga akan semakin banyak informasi yang diberikan perusahaan, khususnya dalam *sustainability report* (Nasir dkk, 2014)

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat dirumuskan hipotesis dengan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



D. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Struktur Modal terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Struktur modal didefinisikan sebagai sumber jangka panjang yang bersifat pinjaman dan modal sendiri (Riza, 2017). Struktur modal diukur menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio ini bertujuan untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Perusahaan yang memiliki hutang yang lebih besar daripada modal cenderung akan mengurangi biaya-biaya termasuk biaya mempublikasikan *sustainability report*.

Manajemen akan berusaha untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan seminimal mungkin untuk menghindari tekanan dari para *debtholders*. *Debtholders* kemungkinan akan menekan manajemen apabila terlalu banyak berkuat dengan aktivitas sosial karena para *debtholders* berharap kepentingannya didahulukan dari pada aktivitas sosial. Oleh karena itu dalam meningkatkan laba, perusahaan akan mengurangi biaya untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial, karena memerlukan biaya yang cukup besar dan perusahaan akan mengurangi tingkat pengungkapan laporan yang bersifat sukarela terlebih terpisah dari *annual report*. Berdasarkan teori sinyal maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa keuangan perusahaan tidak dalam kondisi sehat yang berakibat pada pemberian sinyal negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Berdasarkan penelitian Afsari,dkk (2017) menemukan hasil bahwa struktur modal yang diprosikan dengan *debt to equity* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Dengan demikian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Struktur modal berbengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Pertumbuhan perusahaan (*growth*) merupakan salah satu pertimbangan para investor dalam menanamkan investasinya. Dimana pertumbuhan dapat menunjukan peningkatan kinerja keuangan

perusahaan yang memiliki kesempatan untuk memberikan keuntungan yang tinggi dimasa depan.

Growth merupakan tingkat pertumbuhan perusahaan yang dapat diukur dengan pertumbuhan penjualan perusahaan. Perusahaan dengan *growth* yang tinggi akan mendapat perhatian lebih banyak sehingga diprediksi perusahaan dengan *growth* yang tinggi cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan sukarela untuk meningkatkan citra baik perusahaan di depan investor salah satunya dengan melakukan pertanggungjawaban sosial yang dipublikasikan melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Teori sinyal menyatakan bahwa ketika suatu perusahaan mengalami perkembangan yang baik maka perusahaan akan dengan mudah mendapatkan respon positif dari para investor (Munsaidah, dkk, 2016).

Perusahaan dengan *growth* yang tinggi lebih cenderung melakukan pengungkapan yang lebih luas karena *growth* yang tinggi mengartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki cukup dana untuk mengungkapkan laporan baik yang bersifat wajib maupun sukarela seperti halnya laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Perusahaan yang melakukan pengungkapan lebih luas akan meyakinkan investor untuk menanamkan sahamnya karena dengan adanya tanggung jawab sosial para investor menyadari bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan semata tetapi juga turut peduli terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Munsaidah, dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan yang dikur menggunakan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan yang bersifat sukarela. Dengan demikian maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Komite audit merupakan salah satu dewan pengawasan dari sistem *corporate governance*. Komite audit memiliki peran yang penting dalam mengkoordinasikan anggotanya agar menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Sari dan Marsono (2013) menyatakan bahwa *stakeholder theory* mendapatkan hubungan positif antara komite audit dengan *sustainability report*. Karena, semakin sering komite audit mengadakan rapat, maka koordinasi komite audit akan semakin baik, sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif yang dapat mewujudkan pelaksanaan *good corporate governance* semakin berkualitas. Sehingga, diharapkan dapat mendukung peningkatan publikasi informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kepentingan para *stakeholder*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Marsono (2013) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Dengan demikian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

4. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Keefektifan pengawasan dalam aktivitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh bagaimana dewan komisaris dibentuk dan diorganisir. Kinerja dewan yang baik akan mampu mewujudkan *good corporate governance* bagi perusahaan. Dalam penerapannya, pelaksanaan GCG sangat bergantung pada fungsi-fungsi dari dewan komisaris yang dipercaya sebagai pihak yang mengurus perusahaan. Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola perusahaan (Safitri dan Saifudin, 2019).

Berdasarkan *stakeholder theory*, dewan komisaris merupakan sebuah mekanisme akuntabilitas yang berperan dalam meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi kepentingan *stakeholder*, bukan hanya kepentingan pemegang saja (*shareholder*). Untuk mewujudkan akuntabilitas perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas. Hal ini berarti bahwa semakin banyak

jumlah anggota dewan komisaris, maka akan monitoring akan berjalan dengan baik dan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan akan semakin luas. Penelitian yang dilakukan oleh Rudyanto dan Siregar (2018) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Dengan demikian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Dewan komisarsi berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengungkapan *sustainability report*.

5. Pengaruh *Governance Committe* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Penciptaan *good corporate governance* suatu perusahaan dapat diwujudkan salah satunya melalui pembentukan dan penunjukan anggota *governance committe* yang berkompeten dan berkualitas. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholder* (Safitri dan Saifudin, 2019).

Prastiwi dan Suryono (2011) menyatakan bahwa adanya indeks pengungkapan sukarela yang tinggi terkait dengan praktik *good corporate governance*. Rekomendasi yang dapat diberikan *governance committe* dapat berupa inisiatif untuk melakukan pengungkapan sosial dalam rangka mewujudkan prinsip *transparancy* dari GCG. Pengungkapan sosial menjadi respon perusahaan akan teknan dari pemerintah dan publik maupun sebagai reaksi atas permintaan *stakeholder*. Pengungkapan informasi secara detail akan memberi

gambaran kinerja perusahaan sesungguhnya, khususnya informasi yang ada dalam laporan keberlanjutan, hal ini akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor dan *stakeholder*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh khafid dan Mulyaningsih (2015) menunjukkan hasil bahwa *governance committe* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *sustainability report*. Dengan demikian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: *Governance committe* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.